

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN LAPORAN KEBERLANJUTAN PADA PERUSAHAAN DI INDONESIA

Erlinda Lusiana¹⁾, Shinta Permata Sari²⁾

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

¹E-mail: b200190187@student.ums.ac.id

²E-mail: sps274@ums.ac.id

Abstract

One of the company's goals is to survive in the long term. For this reason, it is necessary to consider several aspects other than profits, namely the environment and society. Companies carry out economic, social, and environmental activities which are informed to stakeholders through a disclosure, namely a sustainability report to describe better performance per year, especially if the company also implements a good corporate governance mechanism. This research aims to analyze corporate governance's influence on the disclosure of sustainability reports for companies listed on the Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) and the Indonesia Stock Exchange (IDX) for 2019-2021. Sustainability reports are measured using the Global Reporting Initiative (GRI) Index. The sample selection used purposive sampling method, with a total sample of 36 companies. Secondary data is used in this study. The data analysis technique uses multiple linear regression. The study's results prove that managerial ownership and the board of directors do not affect sustainability report disclosure. Meanwhile, institutional ownership, audit committee, and board of directors affect sustainability report disclosure.

Keywords: sustainability report; good corporate governance

1. PENDAHULUAN

Berdirinya perusahaan memiliki tujuan utama untuk memperoleh keuntungan atau laba yang maksimal agar perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Selain memperoleh laba, perusahaan memiliki tujuan jangka panjang yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi perusahaan. Namun, demi mencapai tujuan tersebut seringkali perusahaan lalai dalam mengelola dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan dari operasi bisnisnya (Ardiani *et al.*, 2022). Penerapan *good corporate governance* menjadi salah satu alternatif perusahaan dalam mengatur, mengelola, serta mengawasi hubungan antara pengelola perusahaan dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Cadbury Committee of United Kingdom (1992), *Good Corporate Governance* merupakan pedoman yang mengatur hubungan antara

pemangku kepentingan perusahaan (pemegang saham, pengurus/pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan).

Dalam kegiatan bisnis, perusahaan dituntut untuk tidak hanya memperhatikan keuntungan, tetapi juga bersosialisasi pada masyarakat, dan berperan aktif dalam menjaga kesejahteraan lingkungan sesuai dengan konsep *triple bottom line* (*people-planet-profit*) (Elkington, 1998). Maksud dari konsep tersebut adalah bahwa kegiatan bisnis tidak hanya bertujuan menguntungkan perusahaan saja. Namun, aktivitas tersebut juga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat serta berkontribusi dalam mengelola kelestarian lingkungan sekitar dengan mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diungkapkan melalui *sustainability report* (Fatchan & Trisnawati, 2016).

Sustainability report (SR) merupakan teknik pelaporan yang diterbitkan oleh perusahaan yang mencakup tiga aspek yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perusahaan yang mengungkapkan laporan keberlanjutan sesuai Standar *Global Reporting Initiative* (GRI) akan menyajikan informasi mengenai kontribusi positif maupun negatif perusahaan bagi terciptanya pembangunan berkelanjutan (www.globalreporting.org). *National Center for Sustainability Reporting* (NCSR) merupakan organisasi pertama yang memperkenalkan istilah “laporan keberlanjutan” di Indonesia. NCSR bertujuan untuk mengembangkan standar serta meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan, penerapan *good corporate governance*, mendorong kepercayaan pemangku kepentingan, dan sebagai katalis untuk komunikasi, konsultasi, koordinasi dan inisiatif lain yang diperlukan dalam Manajemen Keberlanjutan. NCSR menjalankan program sebagai wujud pengakuan dan penghargaan kepada perusahaan yang telah mengungkapkan laporan keberlanjutan yang diberi nama *Asia Sustainability Reporting Rating* (ASRRAT) (www.ncsr.id).

Praktik dan pengungkapan laporan keberlanjutan diperlukan prinsip-prinsip *Corporate Governance* (CG) yang salah satunya menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan peraturan yang ada serta menjalin kerjasama secara aktif terhadap *stakeholder* demi terwujudnya kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Selain itu, mekanisme dan struktur *corporate governance* dapat dijadikan sarana pendukung terhadap praktik dan pengungkapan *sustainability report* di Indonesia. Adanya mekanisme dan struktur tata kelola ini diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi. Apabila terjadi asimetri informasi, maka kemungkinan besar akan terjadi *adverse selection* maupun *moral hazard* (Aziz, 2014). Salah satu prinsip dasar dalam penerapan *good corporate governance* adalah transparansi (*transparency*). Implementasi atas prinsip transparansi akan membuat perusahaan lebih transparan dan mendorong perusahaan

dalam mengungkapkan lebih banyak informasi termasuk pengungkapan *sustainability report* (Madona & Khafid, 2020).

Banyaknya perusahaan-perusahaan sampai saat ini yang masih belum melaporkan *sustainability report*, serta ketidakkonsistenan hasil dari penelitian terdahulu, menyebabkan *sustainability report* menjadi isu yang penting dan menarik untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian ini akan difokuskan pada perusahaan yang terdaftar di Daftar Pemenang *Asia Sustainability Reporting Rating* (ASRRAT) dan terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan *sustainability report*, salah satunya dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan variabel *good corporate governance*. Pengukuran GCG dalam penelitian ini menggunakan proporsi Kepemilikan Manajerial (KPM), Kepemilikan Institusional (KPI), Dewan Komisaris (DWK), Komite Audit (KTA), dan Dewan Direksi (DD).

Perusahaan yang terdaftar dalam ASRRAT menjadi kajian yang menarik, karena pengungkapan laporan keberlanjutan yang telah dilakukan sebelumnya hanya berorientasi pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Konsep GCG dipilih karena pengungkapan laporan keberlanjutan sangat terkait dengan konsep tata kelola perusahaan.

Stakeholder Theory

Teori *stakeholder* menjelaskan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya berfokus kepada kepentingannya sendiri, namun juga harus memberikan manfaat bagi para *stakeholder*. Adanya pengungkapan *sustainability report*, diharapkan perusahaan mampu memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan dan dapat mengelola *stakeholder* dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Atas dasar teori *stakeholder*, perusahaan akan berusaha memenuhi kebutuhan *stakeholder* salah satunya dengan mengungkapkan *sustainability report* (Madona & Khafid, 2020).

Agency Theory

Teori *Agency* dicetuskan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa teori keagenan merupakan teori ketidaksamaan

kepentingan antara prinsipal dan agen. Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara pemegang saham atau pemilik serta manajemen atau manajer. Menurut teori ini, hubungan antara pemilik dan manajer pada hakekatnya sukar tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan. Penerapan teori *agency* dapat mengakibatkan hubungan asimetri atau konflik keagenan antara agen dan prinsipal. Untuk menghindari konflik tersebut, perusahaan dapat menerapkan GCG sebagai pengendali dalam pelaksanaan perusahaan. *Corporate governance* menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis yang meliputi serangkaian hubungan dan pengungkapan informasi antara *stakeholder* (Putri, 2013).

Sustainability Report

Sustainability Report (SR) merupakan praktek pengukuran, pengungkapan, serta upaya akuntabilitas atas kinerja organisasi perusahaan demi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan kepada para *stakeholder* (Aziz, 2014). *Sustainability report* adalah laporan yang diterbitkan perusahaan atau organisasi mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial akibat imbas yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan. Laporan keberlanjutan menyediakan nilai-nilai suatu organisasi yang dilengkapi dengan model tata kelola, serta menunjukkan hubungan antara strategi perusahaan dengan komitmennya untuk ekonomi global yang berkelanjutan (Standar GRI).

Corporate Governance

Corporate Governance didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang menjadi penentu hubungan para *stakeholder* (pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan) sesuai dengan hak dan kewajibannya (Cadbury Committee, 1992). Berikutnya dikemukakan oleh Agoes (2011) menyatakan bahwa perusahaan dalam melakukan tata kelola perusahaan bersifat transparan dan proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Ada berbagai macam proksi dalam pengukuran *good corporate governance*. Dalam penelitian ini menggunakan proksi kepemilikan manajerial,

kepemilikan institusional, dewan komisaris, komite audit, dan dewan direksi.

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan kondisi dimana manajer mempunyai saham di dalam suatu perusahaan atau dengan artian manajer sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Manajer yang memiliki saham pada perusahaan tentu akan menyeimbangkan kepentingannya sebagai manajer dengan kepentingannya sebagai pemegang saham perusahaan. Semakin besar nilai kepemilikan manajerial, maka akan semakin baik tindakan manajer dalam mengoptimalkan nilai perusahaan. Aktivitas atau kegiatan perusahaan salah satunya adalah pengungkapan laporan keberlanjutan. Hal itu sejalan dengan pendapat Sudarno (2013) bahwa kepemilikan manajerial yang lebih besar, maka berpotensi lebih besar pula pengungkapan *sustainability report* perusahaan.

H1: kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan

Kepemilikan Institusional

Tingkat kepemilikan institusional yang besar berpengaruh terhadap meningkatnya kontrol investor terhadap perusahaan. Hal ini menjadi salah satu alasan suatu pengungkapan perlu untuk dilakukan oleh perusahaan. Pengungkapan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) tersebut dimaksudkan mampu meminimalisir asimetri informasi antara agen dan prinsipal. Hasibuan (2001) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional saham perusahaan, maka pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan akan semakin tinggi pula.

H2: kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan

Dewan Komisaris

Penerapan dewan komisaris independen menjadi implikasi *good corporate governance* memungkinkan perusahaan untuk melakukan pengungkapan lebih kepada para *stakeholder* perusahaan dalam bentuk pengungkapan laporan keberlanjutan. Penelitian yang telah

dilakukan Sari & Marsono (2013) menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

H3: dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan

Komite Audit

Salah satu tugas dari komite audit adalah menelaah informasi yang akan diungkapkan perusahaan kepada publik atau pihak otoritas lain. Monitor yang mendalam atas komite audit mampu mendorong perusahaan dalam melakukan pengawasan yang lebih baik sehingga prinsip-prinsip *good corporate governance* dapat terpenuhi salah satunya prinsip transparansi atau keterbukaan atas segala aktivitas perusahaan yang kemudian melakukan pelaporan (Madona & Khafid, 2020).

H4: komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan

Dewan Direksi

Dewan direksi dapat menentukan arah perusahaan, sehingga dewan direksi dianggap mempengaruhi aktivitas perusahaan, salah satunya adalah pengungkapan *sustainability report*. Besar kecilnya kuantitas dewan direksi disebut dengan ukuran direksi (Susanto *et al.*, 2022). Ukuran dewan direksi yang lebih besar akan memiliki jangkauan yang lebih luas atas akses sumber daya dan kesempatan bila dibandingkan dengan ukuran dewan yang lebih kecil (Shamil *et al.*, 2014). Hal tersebut dikarenakan keberadaan anggota dewan direksi yang lebih besar akan memberikan keahlian dan pengalaman lebih banyak sehingga keputusan dewan direksi lebih baik.

H5: dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan

2. METODE PENELITIAN

2.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang masuk dalam Daftar Pemenang Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) periode 2019 sampai 2021. Teknik

pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang ditentukan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia berupa *sustainability report* dan *annual report* yang dijadikan sampel. Berikut adalah proses seleksi perusahaan yang dijadikan sampel :

Tabel 1. Proses Seleksi Sampel Penelitian

Kriteria Sampel	Jumlah
Jumlah perusahaan yang terdaftar dalam Daftar Pemenang Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) Periode 2019-2021	70
Dikurangi perusahaan yang tidak terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama 2019-2021	(44)
Dikurangi perusahaan yang tidak memenuhi kriteria variabel dalam penyajian annual reportnya selama 2019-2021	(14)
Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria sampel	12
Total Sampel Penelitian 3 Tahun	36

Sumber : Data diolah, 2022

2.2 Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *sustainability report* yang diukur menggunakan indikator *Global Reporting Initiative* (GRI). Perhitungan *sustainability report* dilakukan dengan memberikan skor 1 apabila suatu item diungkapkan dan skor 0 apabila suatu item tidak diungkapkan. Selanjutnya, total item yang diungkapkan yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dijumlahkan lalu dibagi dengan total item yang diharapkan.

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan direksi, komite audit, dan dewan direksi. Kepemilikan manajerial diukur dengan membagi antara jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen dengan jumlah saham yang beredar di perusahaan. Kepemilikan institusional diukur dengan membagi antara kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi dengan jumlah

saham yang beredar di perusahaan. Dewan komisaris diukur dengan membagi antara jumlah anggota dewan komisaris independen dengan total anggota dewan komisaris perusahaan. Komite audit diukur dengan total anggota komite audit di perusahaan. Dewan direksi diukur dengan total anggota dewan direksi di perusahaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Sustainability Report	36	0,180	0,700	0,42622	0,116263
Kepemilikan Manajerial	36	0,000	9,599	0,84875	2,675989
Kepemilikan Institusional	36	50,115	92,217	69,19831	12,733153
Dewan Komisaris	36	0,286	0,700	0,42714	0,113758
Komite Audit	36	3,000	10,000	4,19444	1,430673
Dewan Direksi	36	2,000	13,000	7,55556	3,037334

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, jumlah sampel sebanyak 36 perusahaan dengan periode 4 tahun yaitu 2019-2021. *Sustainability Report* menunjukkan nilai minimal 0,180, nilai maksimal 0,700, nilai mean 0,42622, dan nilai standar deviasi sebesar 0,116263. Hal ini berarti bahwa jumlah rata-rata pengungkapan laporan keberlanjutan di perusahaan sampel sebesar 0,43%. Kepemilikan manajerial menunjukkan nilai minimal 0,000, nilai maksimal 9,599, nilai mean 0,84875, dan nilai standar deviasi sebesar 2,675989. Hal ini berarti bahwa jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajer sebesar 0,85% dari jumlah saham yang beredar. Kepemilikan Institusional menunjukkan nilai minimal 50,115, nilai maksimal 92,217, nilai mean 69,19831, dan nilai standar deviasi sebesar 12,733153. Hal ini berarti bahwa jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi memiliki tingkat presentase yang tinggi sebesar 69% dari jumlah saham yang beredar. Dewan komisaris menunjukkan nilai minimal 0,286, nilai maksimal 0,700, nilai

mean 0,42714, dan nilai standar deviasi sebesar 0,113758. Hal ini berarti bahwa presentase rata-rata dewan komisaris independen sebesar 0,42% dari jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris di perusahaan. Komite audit menunjukkan nilai minimal 3,000, nilai maksimal 10,000, nilai mean 4,19444, dan nilai standar deviasi sebesar 1,430673. Hal ini berarti bahwa rata-rata jumlah komite audit sebanyak 3 sampai 10 orang, artinya perusahaan telah menerapkan kebijakan *corporate governance* bahwa minimal keanggotaan komite audit sebesar 3 orang. Dewan direksi menunjukkan nilai minimal 2,000, nilai maksimal 13,000, nilai mean 7,55556, dan nilai standar deviasi sebesar 3,037334. Hal ini berarti bahwa rata-rata jumlah dewan direksi di perusahaan sampel sebanyak 2-13 orang.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan nilai signifikansi sebesar $0,305 > 0,05$, yang berarti bahwa model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan nilai *tolerance* untuk keseluruhan variabel $> 0,10$ (KPM sebesar 0,885; KPI sebesar 0,730; DWK sebesar 0,737; KTA sebesar 0,613; DD sebesar 0,543) dan nilai VIF untuk keseluruhan variabel $< 10,00$ (KPM sebesar

1,170;

KPI sebesar 1,369; DWK sebesar 1,357; KTA sebesar 1,632; DD sebesar 1,842), yang berarti bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada semua variabel penelitian yang digunakan.

Uji heteroskedastisitas yang digunakan adalah uji *Glejser* dengan nilai signifikansi untuk keseluruhan variabel $> 0,05$ (KPM sebesar 0,608; KPI sebesar 0,371; DWK sebesar 0,361; KTA sebesar 0,077; DD sebesar 0,227). Hal itu berarti bahwa model regresi lolos uji heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji autokorelasi dengan nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,908 yang berarti terletak pada $1,7987 < 1,908 < 2,2013$ ($du < DW < 4-du$), maka data tersebut tidak terjadi autokorelasi atau lolos uji autokorelasi.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	b	Signifikansi	Keterangan
Kepemilikan Manajerial	-0,005	0,444	H ₁ Ditolak
Kepemilikan Institusional	0,003	0,032	H ₂ Diterima
Dewan Komisaris	-0,163	0,320	H ₃ Ditolak
Komite Audit	0,051	0,001	H ₄ Diterima
Dewan Direksi	-0,022	0,004	H ₅ Diterima

Simber : Data diolah, 2022.

3.2 Pembahasan

1) Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan

Kepemilikan Manajerial memiliki nilai signifikansi $0,444 > 0,05$, sehingga **H1 ditolak** yang berarti Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Hasil analisis ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurrahman & Sudarno (2013); Madona & Khafid (2020) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suharyani *et al.*, (2019); Susadi & Kholmi (2021) yang menemukan bahwa struktur kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyampaian laporan berkelanjutan tidak harus mempertimbangkan kepemilikan manajerial sebagai salah satu alasan untuk diungkapkan, tetapi menekankan pada kinerja manajemen perusahaan.

2) Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan

Kepemilikan Institusional memiliki nilai signifikansi $0,032 < 0,05$, sehingga **H2 diterima** yang berarti Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Hasil analisis ini didukung oleh penelitian yang telah

dilakukan oleh Nurrahman dan Sudarno (2013); Susadi & Kholmi (2021) yang menemukan bahwa kepemilikan saham institusi memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan di suatu perusahaan.

Tingkat kepemilikan saham yang dimiliki institusi cenderung efektif dalam mengawasi pengungkapan laporan keberlanjutan. Hal itu terjadi karena kepemilikan institusi memandang bahwa pengungkapan laporan keberlanjutan menjadi kriteria bagi perusahaan dalam melakukan pengungkapan. Perusahaan yang memiliki kepemilikan saham institusi lebih besar, cenderung mempunyai probabilitas yang lebih besar pula dalam mengungkapkan laporan keberlanjutan (Nurrahman dan Sudarno, 2013).

3) Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan

Dewan Komisaris memiliki nilai signifikansi $0,320 > 0,05$, sehingga **H3 ditolak** yang berarti Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Hasil analisis ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Aniktia & Khafid (2015); Situmorang & Hadiprajitno (2016); yang menemukan bahwa proporsi dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Namun, hasil analisis ini tidak sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sari & Marsono (2013); Hasanah *et al.*, (2015); Madona & Khafid (2020) yang menemukan bahwa proporsi dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

Putri (2013) menyatakan bahwa tidak semua anggota dewan komisaris independen dalam perusahaan dapat menunjukkan independensinya. Hal itu mengakibatkan fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik yang akhirnya berdampak pada kurangnya dorongan terhadap manajemen untuk melakukan pengungkapan sosial salah satunya *sustainability report*.

4) Pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan

Komite Audit memiliki nilai signifikansi 0,001 < 0,05, sehingga **H4 diterima** yang berarti Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Hasil hipotesis ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Aniktia & Khafid (2015); Susadi & Kholmi (2021); Wulandari *et al.* (2021); Susanto *et al.* (2022) yang menemukan bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari *et al.* (2021) menjelaskan bahwa komite audit bertugas untuk membantu manajemen dalam mengungkapkan laporan keberlanjutan yang dibutuhkan oleh *stakeholder* dan dibenarkan oleh masyarakat. Melalui monitoring yang ketat dari Komite Audit, maka perusahaan lebih mampu memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance* salah satunya prinsip transparansi, dimana perusahaan harus terbuka terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan dilaporkan oleh perusahaan, sehingga dapat mendorong pengawasan yang baik.

5) Pengaruh Dewan Direksi terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan

Dewan Direksi memiliki nilai signifikansi 0,004 < 0,05, sehingga **H5 diterima** yang berarti Dewan Direksi berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Hasil analisis ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Justin & Hadiprajitno (2019); Susadi & Kholmi (2021) yang menemukan bahwa jumlah dewan direksi di perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

Susanto *et al.* (2022) menyatakan bahwa ukuran dewan direksi yang tinggi tidak menjamin kemampuan pengungkapan laporan keberlanjutan yang tinggi pula. Banyaknya ukuran dewan direksi suatu perusahaan, namun melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan, perusahaan hanya mampu mengungkapkan satu per tiga dari jumlah keseluruhan itemnya. Oleh karena itu, semakin besar jumlah dewan direksi akan membuat pengungkapan laporan keberlanjutan menjadi rendah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional, komite audit, dan dewan direksi memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

Di satu sisi, kepemilikan manajerial dan dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa perusahaan di Indonesia sejauh ini masih berfokus pada pengungkapan laporan informasi keuangan dibandingkan laporan keberlanjutan.

Penelitian yang mengacu pada pengungkapan laporan keberlanjutan masih terbatas pada perusahaan di BEI, sehingga membuka peluang penelitian ini dengan menggunakan sampel lain seperti pada ASRRAT. Periode jangka pendek dalam penelitian ini, menyarankan peneliti selanjutnya untuk menambah periode waktu dan menggunakan indikator pengukuran yang lain dalam mengukur *Good Corporate Governance*.

5. REFERENSI

- Aniktia, R., & Khafid, M. (2015). Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* dan Kinerja Keuangan terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*. *Accounting Analysis Journal*, III(3), 1-10.
- Ardiani, N. P., Lindrawati, & Susanto, A. (2022). Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap Pengungkapan *Sustainability Report* pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, VIII(1), 78-90.
- Aziz, A. (2014). Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Kualitas Pengungkapan *Sustainability Report*. *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura*, III(2), 65-84.

- BINUS. (2017). *Good Corporate Governance*. Retrieved from BINUS University School of Accounting: <https://accounting.binus.ac.id/2017/06/20/good-corporate-governance-gcg/>
- BINUS. (2019). *Memahami Konsep yang ada dalam Corporate Governance*. Retrieved from BINUS University School of Accounting: <https://accounting.binus.ac.id/2019/05/14/memahami-konsep-yang-ada-dalam-corporate-governance/>
- Fatchan, I. N., & Trisnawati, R. (2016). Pengaruh *Good Corporate Governance* pada Hubungan antara *Sustainability Report* dan Nilai Perusahaan. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, I(1), 25-34.
- GRI. (2022). *25 Years of Empowering Sustainable Decisions*. Retrieved from Global Reporting Initiative: www.globalreporting.org
- Hasanah, N., Syam, D., & Jati, A. W. (2015). Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Pengungkapan *Sustainability Report* pada Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, V(1), 711-720.
- Hasibuan, M. R. (2001). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sosial (*Social Disclosures*) Dalam Laporan Tahunan Emitmen Di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Tesis, *Universitas Diponegoro*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 305-360.
- Justin, P., & Hadiprajitno, P. T. (2019). Pengaruh Struktur Dewan Direksi terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, VIII(3), 1-9.
- Madona, M. A., & Khafid, M. (2020). Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Pengungkapan *Sustainability Report* dengan Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi. *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, XIX(1), 22-32.
- Nurrahman, A., & Sudarno. (2013). Pengaruh Kepemilikan Manajeria, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Asing terhadap Praktik Pengungkapan *Sustainability Report*. *Diponegoro Journal of Accounting*, II(1), 1-14.
- Putri, C. (2013). Pengaruh *Corporate Governance* dan Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Dalam *Sustainability Report* (Studi Empiris Perusahaan yang Terdaftar di BEI). *Jurnal Akuntansi*, I(3), 1-27.
- Sari, M. P., & Marsono. (2013). Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, dan *Corporate Governance* terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*. *Diponegoro Journal of Accounting*, II(3), 1-10.
- Shamil, M. M., Shaikh, J. M., Ho, P.-L., & Krishnan, A. (2014). The Influence of Board Characteristics on Sustainability Reporting : Empirical Evidence from Sri Lankan Firms. *Asian review of Accounting*, XXII(2), 78-97.
- SIG. (2020). *Tujuan Penerapan & Dasar-Dasar Pelaksanaan GCG*. Retrieved from <https://sig.id/tujuan-penerapad-dasar-dasar-pelaksanaan-gcg/>
- Situmorang, R., & Hadiprajitno, P. T. (2016). Pengaruh Karakteristik Dewan dan Struktur Kepemilikan terhadap Luas Pengungkapan *Sustainability Reporting*. *Diponegoro Journal of Accounting*, VI(3), 1-14.
- Suharyani, R., Ulum, I., & Jati, A. W. (2019). Pengaruh Tekanan *Stakeholder* dan *Corporate Governance* terhadap

Kualitas *Sustainability Report*. *Jurnal Akademi Akuntansi*, II(1), 71-92.

Susadi, M. N., & Kholmi, M. (2021). Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* dan Struktur Kepemilikan terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, XI(1), 130-139.

Teams, E. (2022). *Committed in Implementing and Developing Sustainable Developments Goals*. Retrieved from National Center for Sustainability Reporting: ncsr.id

Wulandari, R., Fauziyah, S., & Mubarak, A. (2021). Pengaruh Komite Audit dan Struktur Modal terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*. *Journal Accounting and Finance*, VI(02), 181-193.